

**THE DETERMINATION OF COST OF GOODS SOLD OF PALM OIL FRESH FRUIT BUNCHES OF
INDEPENDENT FARMERS AT INDRAGIRI HILIR REGENCY RIAU PROVINCE**

Riyadi Mustofa¹, Riati Bakce²

^{1&2}Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Persada Bunda

Email: riyadimustofa@gmail.com

ABSTRACT

Palm oil are designed commodities to meet industrial needs where all parts of plant morphology beneficial to human life have economic value, produce derivative industrial raw materials and become commodities that function as economic stability. Oil palm plants can grow and develop on various land typologies and can be cultivated by the community as independent smallholders. One of them is in Indragiri Hilir Regency which is dominated by wetland. The purpose of this study was to determine the amount of cost of goods produced needed to produce each kilogram of FFB by independent smallholder oil palm plantation farmers in Indragiri Hilir District based on land typology and based on cultivation patterns. The method used in determining the cost of goods produced in oil palm plantation farming uses the full costing method. Full Costing calculation by summing all cost components including unexpected costs. The results showed that based on land typology, the average cost of goods produced (HPP) of fresh fruit bunches (FFB) for oil palm was Rp.1,648.40/k, HPP on dry land was Rp.1,507.26/kg and HPP on wetlands was Rp.1,789.54/kg. Based on cultivation patterns, farmers who have implemented Good Agricultural Practices (GAP) have an average HPP of Rp. 1,831.91/kg FFB and farmers who have not implemented an average HPP GAP of Rp. 1,464.89/kg.

Keywords: *Palm Oil; Land; Cost of Goods Sold; Production Cost*

**PENENTUAN HARGA POKOK PRODUKSI (HPP) TANDAN BUAH SEGAR (TBS) KELAPA SAWIT
PETANI SWADAYA DI KABUPATEN INDRAGIRI HILIR PROVINSI RIAU**

ABSTRAK

Komoditas kelapa sawit dirancang untuk memenuhi kebutuhan industri dimana seluruh bagian dari morfologi tanaman bermanfaat bagi kehidupan manusia memiliki nilai ekonomis, menghasilkan bahan baku industri turunan dan menjadi komoditi yang berfungsi sebagai stabilitas ekonomi. Tanaman kelapa sawit dapat tumbuh dan berkembang pada berbagai tipologi lahan dan dapat diusahakan oleh masyarakat sebagai petani swadaya. Salah satunya di Kabupaten Indragiri Hilir dengan tipologi lahan didominasi lahan basah. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui besarnya harga pokok produksi yang dibutuhkan untuk menghasilkan setiap kilogram TBS oleh petani perkebunan kelapa sawit rakyat swadaya di Kabupaten Indargiri Hilir berdasarkan tipologi lahan dan berdasarkan pola budidaya. Penelitian dilakukan dari bulan Agustus sampai dengan Desember 2023, data penelitian berupa data primer yang bersumber dari petani kelapa sawit rakyat sebagai responden sebanyak 102 orang. Pemilihan responden menggunakan stratified sampling dan incidental sampling, metode analisis data analisis spasial dan full costing. Perhitungan Full Costing digunakan dalam penentuan harga pokok produksi pada usahatani perkebunan kelapa sawit dengan menjumlahkan seluruh komponen biaya termasuk biaya tidak terduga. Hasil penel digunakan dalam penentuan harga pokok produksi pada usahatani perkebunan kelapa sawit itian menunjukan bahwa berdasarkan tipologi lahan, rerata harga pokok produksi (HPP) tandan buah segar (TBS) kelapa sawit sebesar Rp.1,648.40/k, HPP pada lahan kering sebesar Rp.1,507.26/kg dan HPP pada lahan basah sebesar Rp.1,789.54/kg. Berdasarkan pola budidaya, petani yang telah menerapkan Good Agricultural Practices (GAP) rerata HPP sebesar Rp.1,831.91/kg TBS dan petani yang belum menerapkan GAP rerata HPP sebesar Rp. 1,464.89/kg.

Kata Kunci: Kelapa Sawit; Lahan; Harga Pokok Produksi; Biaya Produksi

LATAR BELAKANG

Kelapa sawit (*Elaeis guineensis*) merupakan tanaman berasal dari daerah iklim tropis yang menghasilkan minyak nabati, bahan olahan industri makanan, kosmetik, dan bahan bakar biodiesel (Pahan, 2012). Komoditas kelapa sawit dirancang untuk memenuhi kebutuhan industri (Pahan, 2015), seluruh bagaian dari morfologi tanaman bermanfaat bagi kehidupan manusia memiliki nilai ekonomis (Wicaksono et al., 2018). Sehingga, komoditas kelapa sawit menjadi unggulan suatu daerah hingga menjadi unggulan nasional. Meskipun sebagai sektor yang diunggulkan, pro dan kontra pada dampak perkebunan kelapa sawit terus menjadi isu nasional bahkan internasional sehingga menghambat tumbuh kembangnya perkebunan kelapa sawit di Indonesia. Kelapa sawit sering mendapat tuduhan sering dianggap memicu tekanan konversi dan alih fungsi lahan terhadap sumber daya hutan, deforestasi, hilangnya habitat satwa liar, dan dieksploitasi tanpa memiliki kelengkapan dokumen dan mengabaikan *Good Agricultural Practices* (GAP) dan tekanan terhadap lingkungan (Hutabarat, 2017) serta menimbulkan potensi konflik (Mustofa & Bakce, 2019). Namun Sebagian konflik dapat diselesaikan dengan model litigasi dan non litigasi (Kristiadi Harun & Dwiprabowo, 2014).

Sebagai komoditas kelapa sawit dirancang sebagai bahan baku industri yang tahan oksidasi dengan tekanan tinggi dan kemampuannya melarutkan bahan kimia yang tidak larut oleh bahan pelarut lainnya, serta daya melapis yang tinggi membuat minyak kelapa sawit dapat digunakan untuk beragam peruntukan industri turunan, diantaranya yaitu untuk minyak masak, minyak industri, maupun bahan bakar (biodiesel). Sehingga, komoditas kelapa sawit menjadi salah satu komoditas unggulan berperan penting dalam perekonomian nasional yang diusahakan oleh Perkebunan Besar Nasional (PBN), Perkebunan Besar Swasta (PBS) dan perkebunan yang diusahakan oleh masyarakat dikenal dengan Perkebunan Rakyat (PR). Peranya yang begitu besar terhadap perekonomian terus menjadi daya tarik bagi pelaku usaha dan pekebun untuk mempertahankan luas areal untuk intensifikasi dan ekstensifikasi lahan memproduksi tandan buah segar (TBS) kelapa sawit. Luas perkebunan kelapa sawit pada tahun 2022 pada angka sementara mencapai 16,833,985 ha terdiri dari Perkebunan Rakyat 6.159.333 ha, Perkebunan Besar Nasional 559.370 ha, dan Perkebunan Besar Swasta 8.266.780 ha dengan angka koreksi sebesar 1.848.501 ha memberikan kontribusi ekspor 26.766.373 (dalam 000 US). Sedangkan luas perkebunan kelapa sawit di Provinsi Riau mencapai 3.494.583 ha terdiri dari PR 1.762.163 ha, PBN 75.083 ha, dan PBS 1.021.406 ha dengan angka koreksi sebesar 635.931 ha mampu memproduksi 8.969.588 ton TBS (Dirjenbun, 2022).

Untuk peningkatan produktivitas, menekan biaya produksi, meminimalisir risiko dan meningkatkan pendapatan petani (pekebun), pemerintah melalui Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit memberikan bantuan dana program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) sejak tahun 2018 yang menitikberatkan pada prinsip produktivitas, legal, dan sustainability atau Sertifikasi Indonesia Sustainable Palm Oil (ISPO) pada pekebun yang telah mengikuti PSR (Apriyanto et al., 2021). sPeremajaan sawit rakyat menitikberatkan pada meningkatkan pendapatan daerah setempat melalui pengembangan perkebunan. hilirisasi berbasis kelapa sawit. penguasaan ekonomi nasional dengan melibatkan masyarakat dan pengusaha lokal. dan pengembangan wilayah dimana perkebunan kelapa sawit berada. Sehingga secara bertahap pekebun khususnya pekebun rakyat swadaya telah menerapkan *Good Agricultural Practices* (GAP) sebagai pemenuhan kepatuhan terhadap lingkungan dalam pengelolaan sumberdaya alam berkelanjutan secara social, ekonomi, lingkungan dan kepatuhan terhadap hukum dan tata kelola (Syahza, Robin, et al., 2021) untuk meningkatkan kepastian usahatani, mempermudah akses ke Lembaga keuangan dan meningkatkan kesejahteraan petani beserta masyarakat disekitarnya dalam rangka menjaga stabilitas ekonomi masyarakat.

Bank Indonesia juga menyatakan bahwa kondisi Stabilitas Sistem Keuangan (SSK) tetap terjaga dimana pertumbuhan ekonomi domestik tetap kuat di tengah ketidakpastian global, komoditas perkebunan sebagai salah satu sektor yang memiliki daya ungkit tinggi terhadap pertumbuhan ekonomi ditopang oleh pertumbuhan kinerja korporasi dan rumah tangga terutama rumah tangga petani. Pada masa pandemic covid-19 hingga saat ini perkebunan kelapa sawit memberikan dampak ekonomi dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pendapatan asli daerah (PAD), meningkatkan kesejahteraan masyarakat, membuka kesempatan kerja dan berusaha pada sentra produksi TBS di Provinsi Riau dan sentra produksi turunannya. Kesejahteraan dirasakan oleh seluruh masyarakat yang terlibat hulu hilir usahatani antara lain yaitu petani, buruh dan pekerja, pedagang dan pengusaha, masyarakat sekitarnya dan pemerintah. Petani menerima pendapatan yang lebih dari penjualan TBS mereka, buruh dan pekerja menerima pendapatan atas imbal jasa dari proses produksi, pedagang dan pengusaha menerima pendapatan atas transaksi jual beli TBS dan input factor produksi, masyarakat sekitarnya menerima pendapatan atas multiplier efek distribusi orang dan barang serta pemerintah mendapatkan tambahan penerimaan atas redistribusi dan pajak bumi dan bangunan.

Salah satu sentra produksi TBS perkebunan kelapa sawit rakyat adalah Kabupaten Indragiri Hilir memiliki 308.197 ha tersebar pada daratan 11.605,97 ha dimana 70% dari luas daratan adalah hamparan lahan gambut dengan kedalaman gambut yang bervariasi. Sebagai komoditas kelapa sawit dirancang dalam usahatani harus mempertimbangkan kelayakan teknis dan kelayakan ekonomis. Kelayakan teknis meliputi tipologi lahan, varietas benih, pola budidaya dan memenuhi regulasi yang berlaku. Kelayakan ekonomi meliputi estimasi biaya dan pendapatan, estimasi biaya digunakan untuk menghitung harga pokok produksi (HPP) setiap kilogram TBS dalam

satuan rupiah dan pendapatan dari penjualan TBS dalam satuan kilogram. Biaya terdiri dari tetap dan biaya variabel sedangkan pendapatan diperoleh dari penjualan TBS.

Hasil penelitian (Purwanto & Watini, 2020) menyatakan bahwa perhitungan harga pokok produksi ini menghasilkan selisih yang berpengaruh terhadap penetapan harga jual produk, semakin kecil harga pokok produksi berpotensi menambah keuntungan dan sebaliknya. Selanjutnya (Turang et al., 2022) menyatakan bahwa penentuan harga pokok produksi sangat menentukan besarnya keuntungan dan keberhasilan suatu usaha. Penentuan HPP dengan metode full costing menurut (Harefa RA et al., 2022) bentuk kehati-hatian dalam menghitung biaya produksi dan menentukan besarnya keuntungan. Penentuan HPP untuk menghitung biaya yang diperlukan untuk memproduksi TBS per kilogram dan mengetahui faktor apa saja yang menjadi pertimbangan petani dalam menjual hasil panennya. Mengingat seluruh petani kelapa sawit rakyat di Kabupaten Indragiri Hilir seluruhnya adalah petani swadaya. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui besarnya harga pokok produksi yang dibutuhkan untuk menghasilkan setiap kilogram TBS oleh petani perkebunan kelapa sawit rakyat pola swadaya di Kabupaten Indragiri Hilir berdasarkan tipologi lahan dan berdasarkan pola budidaya.

TINJAUAN PUSTAKA

Manajemen

Setiap usaha atau kegiatan yang dilakukan oleh setiap individu, organisasi, dan pemerintah hingga perusahaan memerlukan system manajemen untuk mengatur, mengelola, mengarahkan, melaksanakan dan mengawasi setiap aktivitas. Manajemen dalam arti luas adalah bagaimana mengelola sumberdaya yang tersedia melalui tangan orang lain untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan berdasarkan (Sparta & Handini, 2015) menggunakan sumberdaya yang tersedia secara optimal (Maulida, 2021). Manajemen dilihat dari sudut pandang aktivitas manajemen diarahkan untuk mencapai tujuan individu, rumah tangga, organisasi maupun badan usaha secara efektif dan efisien dalam menggunakan sumber daya yang tersedia (Maulida, 2021). Efektif yang dimaksud adalah sistematis dalam proses pelaksanaan, tepat sasaran dan mencapai tujuan sesuai yang direncanakan. Sedangkan efisien yang dimaksud adalah tepat dalam penggunaan sumberdaya yang ada baik sumberdaya manusia, sumberdaya alam, modal kerja, dan penggunaan tanah tempat usaha (Saeri, 2018).

Manajemen Agribisnis

Usaha dalam sector pertanian sebagai salah satu usaha yang rumit dan menarik dalam menghasilkan produksi primer, di mana input-input pertanian (lahan benih, pestisida, alsintan, modal dan tenaga kerja) melalui proses biologis akan menghasilkan output pertanian (pangan dan serat) (Asmarantaka, 2014). proses yang melinatkan input, proses biologis dan output tersebut harus dikelola dengan baik melalui system manajemen yaitu manajemen agribisnis. Sistem agribisnis merupakan keterkaitan dalam subsistem sarana produksi pertanian (saprodi atau sapronak), usaha tani (*on-farm*), pemasaran dan pengolahan (*off-farm*) dan sub sistem penunjang (kredit, penyuluhan, kebijakan-kebijakan dan kelembagaan). Sistem agribisnis, subsistemnya (*off-farm*) sering disebut dengan sub sistem hulu dan hilir, kemudian subsistem usaha tani (*on-farm*).

Dalam usahatani kelapa sawit sistem agribisnis melibatkan (Pahan, 2012): 1) Subsistem input (hulu) atau *off-farm up-stream*, yaitu subsistem pengadaan sarana produksi pertanian: 2) Subsistem *on-farm (pertanian primer/ budi daya)*, yaitu subsistem yang melakukan usaha tani atau proses budi daya untuk menghasilkan produk pertanian primer (komoditi pertanian); 3) Subsistem pengolahan dan pemasaran (*off-farm down stream*) atau subsistem hilir. Setiap subsistem saling memiliki keterkaitan bersifat timbal balik atau simultan yang saling mempengaruhi (*forward and backward linkage*). Kegagalan dalam pengelolaan setiap subsistem akan berdampak pada besarnya biaya yang dikeluarkan, waktu proses produksi yang lama dan kualitas hasil dan masa tunggu panen (Pahan, 2015) berakibat pada tingginya harga pokok produksi TBS. Petani memiliki peran pada semua lini fungsi manajemen dalam mengelola 5 M (*men, materials, machines, methods and money*) yang harus didampingi oleh penyuluh dan pemerintah sebagai pemegang kebijakan sector pertanian melalui penetapan harga TBS.

Kelapa Sawit

Kelapa sawit (*elaeis guineensis*) merupakan komoditas kelapa sawit dirancang untuk memenuhi kebutuhan industri (Pahan, 2012), seluruh bagian dari morfologi tanaman bermanfaat bagi kehidupan manusia memiliki nilai ekonomis (Pahan, 2015). Tanaman kelapa sawit berasal dari daerah iklim tropis yang menghasilkan produk utama Crude Palm Oil (CPO) dan Palm Oil Kernel (POK) serta produk turunan lainnya seperti minyak nabati, bahan olahan industri makanan, kosmetik, dan bahan bakar biodiesel (Faizal et al., 2018). Tanaman kelapa sawit dapat tumbuh di berbagai tipologi lahan seperti mineral dan gambut, termasuk gambut pedalaman, gambut pasang surut dan gambut pesisir. Tipologi lahan merupakan faktor penting dalam menentukan kelas kesesuaian lahan untuk perkebunan termasuk kondisi tanah, topografi, iklim, drainase dan ketersediaan air serta ketersediaan infrastruktur.

Lahan

Lahan sebagai media tanam merupakan wilayah di permukaan bumi, mencakup semua komponen biosfer yang berfungsi mendukung kehidupan manusia (Ritohardoyo & Sadali, 2017) dan makhluk hidup lainnya dalam siklus

kehidupan (Muta' Ali et al., 2012). Lahan berperan sebagai input yang sangat penting dalam proses usahatani dengan persyaratan kualitas/karakteristik lahan sesuai dengan jenis tanaman yang diharapkan untuk penerapan GAP oleh petani (Ratmini, 2012). Lahan memiliki banyak fungsi yaitu; (1) fungsi produksi; (2) fungsi lingkungan biotik; (3) fungsi pengatur iklim; (4) fungsi hidrologi; (5) fungsi penyimpanan; (6) fungsi pengendali sampah dan polusi, (7) fungsi ruang kehidupan; (8) fungsi peninggalan dan penyimpanan; (9) fungsi penghubung spasial (Mishra et al., 2020). Lahan terbagi menjadi dua bagian utama yaitu lahan kering yang digunakan untuk usaha pertanian dengan menggunakan air secara terbatas dan lahan basah atau lahan bawah dengan ketersediaan air cukup (Mustofa, 2017).

Secara ekonomi, lahan mempunyai tingkat produktivitas yang berbeda antara satu agroekosistem dengan agroekosistem lainnya atau bersifat spesifik lokasi (Bareille et al., 2020). Luas lahan menjadi penentu besaran skala usaha, organisasi tata kerja, penggunaan teknologi, penggunaan faktor-faktor produksi, dan perizinan yang harus dimiliki dalam usahatani kelapa sawit (Pahan, 2012). Semakin luas lahan yang digunakan dalam usahatani perkebunan akan mempengaruhi teknis dalam pembukaan lahan, penanaman, pemeliharaan, pemanenan, pengangkutan hingga sistem pemasaran dan harga output (Evizal, 2014). Sehingga luas lahan memiliki peran penting dalam menentukan harga output yang berkontribusi terhadap besarnya pendapatan dan kesejahteraan petani (Syahza et al., 2020).

Lahan kering dapat didayagunakan secara permanen maupun musiman dengan sumber air berupa hujan atau air irigasi. Tipologi lahan kering berada di dataran rendah (0-700 m dpl) hingga dataran tinggi > 700 m dpl (Reibelt et al., 2019). Lahan basah adalah daerah rawa, payau, gambut, atau badan perairan lainnya baik secara alami atau buatan yang airnya mengalir atau tergenang bersifat tawar, payau, salin termasuk kawasan laut yang jeluk airnya pada saat surut terendah tidak lebih dari enam meter. Tipologi lahan sangat menentukan variable faktor produksi, tenaga kerja, modal dan manajemen. Kelas kesesuaian lahan kering di Provinsi Riau pada umumnya masuk dalam kesesuaian lahan kategori S2 memiliki potensi produktivitas 20 hingga 26 ton TBS/ha/tahun. Sedangkan lahan basah terutama gambut kesesuaian lahan pada umumnya kategori S3 tergantung pada karakteristik tanah meliputi kematangan gambut, ketebalan gambut, drainase atau genangan dan substratum bahan sulfidik atau pasir.

Pemanfaatan gambut sebagai sumber penghidupan khususnya sektor pertanian masih menjadi pilihan utama terutama bagi wilayah yang didominasi lahan gambut, seperti di Riau, Jambi, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah melalui penguatan kelembagaan petani (Wahyuni, 2017), dengan komoditas utama kelapa sawit yang membutuhkan drainase untuk pengelolaan air harus menjadi pengatur air ketika terjadi kelebihan di musim basah dan menjadi konservasi pada musim kering. Keberhasilan pengelolaan lahan gambut terletak pada pengelolaan air (*water management*), yang tujuannya untuk mengatur, mengendalikan dan memanfaatkan sumber daya air secara optimal akan mendapatkan hasil pada tingkat produktivitas yang optimal. Produktivitas Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit pada perkebunan rakyat di lahan gambut umumnya masih rendah yaitu 10-15 ton/ha/tahun. Rendahnya produktivitas kontradiktif dengan produktivitas kelapa sawit pada perusahaan swasta yang mencapai 20-30 ton TBS/ha/tahun. Rendahnya produktivitas perkebunan kelapa sawit rakyat disebabkan oleh kurangnya pengetahuan dan modal dalam pengelolaan kelapa sawit di lahan gambut. Produktivitas kelapa sawit di lahan gambut topogen mencapai 19,64-25,53 ton TBS/ha/tahun, sedangkan pada lahan gambut ombrogen hanya 9,93-13,51 ton TBS/ha/tahun (Pahan, 2012). Perbedaan produktivitas pada tipologi lahan berdampak pada HPP TBS dan pendapatan petani (Nasrul et al., 2012).

Biaya

Secara akuntansi biaya mempunyai tiga tujuan pokok yaitu penentuan harga pokok produk, pengendalian biaya dan pengambilan keputusan khusus (Fauziyyah et al., 2021), untuk memenuhi tujuan penentuan harga pokok produksi, secara akuntansi mencatat, menggolongkan dan meringkas seluruh biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan produk yaitu TBS. Harga pokok produksi merupakan kumpulan dari biaya-biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh dan mengolah bahan baku sampai menjadi barang jadi. Biaya sebagai suatu pengorbanan sumber ekonomi yang diukur dalam satuan uang, untuk mendapatkan barang atau jasa yang diharapkan akan memberikan keuntungan atau manfaat pada saat ini atau masa yang akan datang (Rosnita, 2012). Biaya produksi adalah seluruh biaya yang berhubungan langsung dengan produksi, dari biaya untuk mengolah bahan baku menjadi barang jadi untuk dijual. Secara umum biaya dikategorikan ke dalam tiga bagian, yaitu biaya bahan baku (*raw material cost*), biaya tenaga kerja langsung (*direct labor cost*), dan biaya overhead pabrik (*manufacturing overhead cost*), semua biaya yang dikeluarkan harus tercatat dan sistematis untuk pengambilan keputusan manajemen (Evizal, 2014).

Harga Pokok Produksi (HPP)

Harga pokok produksi adalah seluruh pengorbanan sumber ekonomi yang diukur dalam satuan uang yang telah terjadi atau kemungkinan terjadi untuk memproduksi suatu produk, produk dari hasil usahatani perkebunan kelapa sawit yaitu tandan buah segar (TBS) kelapa sawit. Komponen biaya tetap meliputi investasi lahan, biaya penyusutan tanaman dan peralatan sedangkan biaya variabel terdiri dari biaya panen, angkut, pemeliharaan termasuk biaya yang tidak terduga (Atikah & Sutopo, 2014). Penentuan harga pokok barang suatu proses penting

dalam menentukan harga pokok produksi melalui proses gabungan mengalokasikan biaya produksi termasuk biaya bahan baku langsung, biaya tenaga kerja langsung dan biaya tidak langsung. Dalam akuntansi biaya, produk bersama dan produk sampingan mengacu pada produk yang dihasilkan melalui serangkaian proses produksi dari awal hingga produk akhir (Fauziyyah et al., 2021) untuk memperoleh penghasilan dari penjualan TBS (Lubis, 2008; Peraturan Menteri Pertanian, 2016). Petani menjual TBS pada penampung tingkat satu yang ada di desa atau dekat dengan tempat tinggal, penampung tingkat satu menjual. Petani sawit kurang memahami informasi terkait flutuasi harga TBS akibat kurang mengikuti kemitraan dan kelembagaan petani (Mustofa, 2017).

Pendapatan

Pendapatan merupakan selisih antara total penerimaan dikurangi total biaya (Pahan, 2008, 2015). Pendapatan usahatani dapat dipengaruhi oleh besaran produksi dan harga TBS, semakin tinggi produksi dan harga TBS maka semakin besar pendapatan petani. Sebaliknya semakin rendah produksi dan harga TBS maka semakin kecil pendapatan dan semakin besar potensi kerugian petani (Pahan, 2015). Pendapatan petani juga ditentukan oleh kualitas buah, letak kebun, dan sarana serta prasarana penunjang. Kualitas yang baik akan diharap lebih tinggi dibandingkan kualitas buah yang lebih rendah. Kualitas buah rendah dengan letak yang kebun yang terpencar serta sarana jalan yang rusak akan menambah biaya angkut, sehingga menambah biaya produksi dan mengurangi pendapatan bagi petani (Saeri, 2018). Proses produksi sangat dibutuhkan kecermatan dalam pengalokasian biaya agar biaya yang dikeluarkan efisien dan menambah keuntungan. Pasar TBS dan minyak kelapa sawit tidak termasuk dapat pasar persaingan sempurna, pembentukan harga TBS minyak kelapa sawit di pasar internasional lebih dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu supply dan demand minyak kelapa sawit, harga minyak nabati lain (terutama kedelai), cuaca, serta kebijakan impor negara-negara pengimpor minyak kelapa sawit. Sehingga produsen atau petani hanya mampu menentukan harga pokok produksi TBS yang dihasilkan dan tidak dapat menentukan harga pokok penjualan, berapapun harga pasar TBS saat itu petani tetap harus melakukan pemanenan dan penjualan TBS untuk meminimalisir kerugian.

METODE PENELITIAN

Waktu dan Tempat

Penelitian dilakukan di Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau mulai bulan Agustus hingga Desember 2023. Pemilihan lokasi mempertimbangkan bahwa 45,48% perkebunan kelapa sawit rakyat berada dalam ketidaksesuaian lahan dan peruntukan ruang (P3ES, 2021). Lokasi penelitian merupakan salah satu wilayah dengan perkebunan kelapa sawit rakyat seluruhnya pola swadaya dengan karakteristik wilayah yang unik. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pekebun kelapa sawit rakyat di Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau. Metode pengambilan sampling menggunakan stratified sampling dan incidental sampling. Stratified sampling digunakan karena memiliki karakteristik heterogen atau populasi bervariasi sesuai strata (Syahza, 2021). Incidental sampling digunakan untuk populasi yang digunakan sebagai sampel yang kebetulan bertemu dan memenuhi persyaratan sebagai sumber data (Maleong, 2013). Responden terdiri dari petani individu mewakili satu rumah tangga petani yang mewakili tipologi lahan.

Penentuan harga pokok produksi pada usahatani perkebunan kelapa sawit menggunakan metode full costing. Metode ini merupakan metode penentuan cost produksi yang terdiri dari biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik, baik yang berperilaku variabel maupun tetap. Perhitungan dengan menjumlahkan seluruh komponen biaya tanpa memperhitungkan produk yang sudah terjual atau belum. Sehingga seluruh pengeluaran yang telah dialokasikan dihitung sebagai biaya produksi (Kariyasa, 2015) yang menentukan HPP setiap satuan luas lahan (Amalia et al., 2017) termasuk biaya tidak terduga dalam pengendalian hama dan penyakit tanaman (Hafif et al., 2020).

Analisis Data

Penelitian ini menggunakan analisis mix method yaitu analisis spasial dan full costing. Analisis spasial untuk melihat kondisi eksisting bentuk lahan, tipologi, karakteristik, fenomena dan sebaran perkebunan kelapa sawit rakyat (Haque & Basak, 2017). Analisis full costing untuk menentukan biaya total produksi suatu produk yaitu TBS. Hasil analisis spasial representatif dari pola, trend, interaksi untuk menduga dan menyusun model (Nurkholis & Sitanggang, 2019) hingga pengambilan keputusan spasial (Mulyadi et al., 2015). Sedangkan hasil analisis full costing adalah harga pokok produksi tandan buah segar dalam satuan Rp./kg (Pahan, 2015).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Lokasi Penelitian

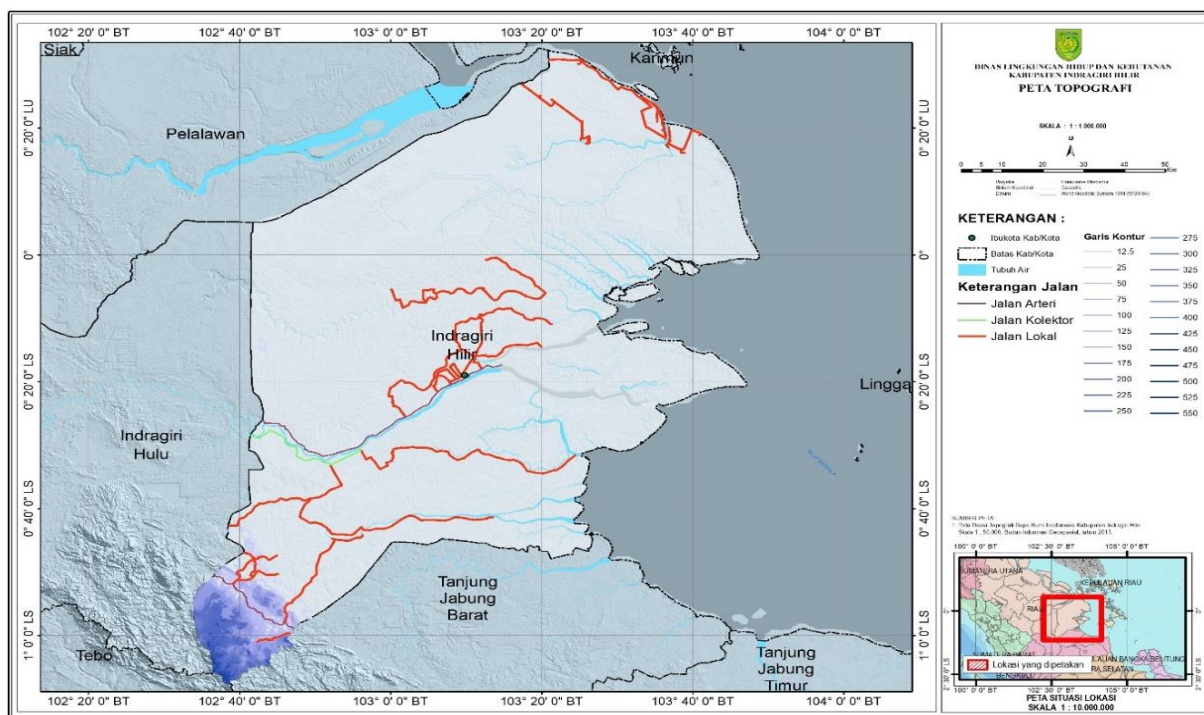
Wilayah Kabupaten Indragiri Hilir rata-rata memiliki ketinggian 0 – 3 Meter di atas permukaan laut, wilayah landai sebagian besar terletak di dekat pantai atau sungai. Sedangkan sebagian kecilnya 6.69 % berupa daerah berbukit-bukit dengan ketinggian rata-rata 6 – 35 meter dari permukaan laut yang terdapat di bagian selatan Sungai Reteh, Kecamatan Keritang. Secara fisiografinya, wilayah Kabupaten Indragiri Hilir terbelah-belah oleh beberapa sungai, terusan, sehingga membentuk gugusan pulau-pulau. Sebagian besar wilayah Kabupaten Indragiri Hilir merupakan

dataran rendah, yaitu daerah endapan sungai, daerah rawa dengan tanah gambut (peat), dan daerah hutan payau (mangrove) pada dataran rendah atau daerah pesisir timur dengan ketinggian < 500 meter dari permukaan laut. luas perkebunan kelapa sawit rakyat di kabupaten indragiri hilir mencapai 189.420 ha melibatkan 123.852 petani atau 7,24% dari luas wilayahnya yang tersebar pada seluruh tipologi lahan dengan rerata luas kepemilikan lahan 1,53 ha/petani. Kondisi topografi wilayah Kabupaten Indragiri Hilir disajikan pada Gambar 1.

Kepemilikan luas lahan 1,53 ha/petani belum cukup dengan asumsi bahwa dalam satu keluarga petani terdapat 2 orang petani hanya 3,06 ha/kepala keluarga (KK), idealnya adalah kepemilikan lahan perkebunan kelapa sawit setiap keluarga 4 ha (syahza & asmit, 2019) sudah dapat memenuhi kebutuhan primer, sekunder, kesehatan dan pendidikan anak hingga jenjang perguruan tinggi (Suwondo et al., 2021). Hal ini yang menjadi penyebab kurangnya kesejahteraan petani sangat tergantung kepada penguasaan luas lahan dan pendidikan petani, disisi lain luas lahan dan pendidikan petani mencerminkan strata dan status social di masyarakat (Saeri, 2018). Permasalahan penguasaan luas lahan yang sangat minim seringkali petani termarjinalkan dan berada dalam lingkaran kemiskinan akibat kurangnya sumberdaya manusia dan diversifikasi usaha (Mustofa, 2021) serta kurangnya bimbingan dan perhatian dari pemerintah menyebabkan tidak memiliki akses ke lembaga keuangan.

Karakteristik Responden

Karakteristik responden dilihat dari jenis kelamin, pendidikan, luas lahan, produktivitas lahan dan tipologi lahan serta pola budidaya. Resppnden yang berhasil dijumpai dan bersedia diwawancarai sebanyak 102 orang terdiri dari jenis kelamin laki-laki 91 orang dan 11 orang berjenis kelamin perempuan. Banyaknya responden laki-laki secara kebetulan dan pada umumnya pekerja sector perkebunan lebih banyak diminati oleh pekerja laki-laki karena lebih membutuhkan tenaga atau energi yang lebih kuat, sedangkan pekerja perempuan lebih banyak membantu pekerjaan laki-laki atau mengambil pekerjaan yang tidak membutuhkan tenaga lebih banyak (Saeri, 2018) seperti mengutip brondolan dan pemupukan. Berdasarkan tipologi lahan responden yang berada di lahan kering sebanyak 31 orang dan berada di lahan basah sebanyak 71 orang. Responden yang berada di lahan kering tersebar di Kecamatan eritang dan Kemuning, sedangkan responden yang berada di lahan basah tersebar di Kecamatan Kemapas, Tempuling, Reteh, Sungai Batang dan Tembilahan Hulu. Dilihat dari pendidikan responden, yang tamat SD, SMP/SLTP, SMA/SMU/SMK, Diploma/Sarjana secara berturut-turut sebanyak 7 orang, 29 orang, 57 orang, dan 9 orang.



Gambar 1. Peta Topografi Kabupaten Indragiri Hilir

Dari Gambar 1 dapat dilihat daratan lahan berbukit dan bergelombang atau terdapat di sebelah barat daya dan sedikit mengarah ke timur laut memanjang sebagai perbatasan (transisi) antara lahan kering dan lahan basah. Lahan transisi pada umumnya merupakan lahan rawa kering yang tidak dialiri oleh pasang surut dan hanya mendapatkan limpasan air dari daerah diatasnya. Berdasarkan luas kepemilikan lahan, total kepemilikan luas lahan 409 ha yang dimiliki oleh 102 rumah tangga petani yang terdiri dari kepemilikan luas lahan pada tipologi lahan

Penentuan Harga Pokok Produksi (HPP) Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit Petani Swadaya di Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau (Riyadi Mustofa dan Riati Bakce)

kering seluas 81 ha dan tipologi lahan basah seluas 328 ha. Rerata kepemilikan lahan setiap rumah tangga petani atau kepala keluarga petani kelapa sawit swadaya di Kabupaten Indragiri Hilir sebanyak 4,01 ha/kk terdiri dari rerata kepemilikan di lahan daratan 2,61 ha/kk dan rerata kepemilikan lahan di lahan basah 4.62 ha/kk. Secara umum rumah tangga petani perkebunan kelapa sawit rakyat swadaya di Kabupaten Indragiri Hilir kepemilikan lahan tersebut termasuk dalam kepemilikan ideal cukup untuk memenuhi kebutuhan primer, sekunder, kebutuhan Kesehatan dan Pendidikan anak ke jenjang perguruan tinggi. Pemenuhan semua kebutuhan sebagai indikator bahwa petani kelapa sawit lebih sejahtera dibandingkan dengan petani komoditas lainya seperti karet, padi dan sagu karena tingkat harga yang sangat fluktuatif.

Secara pola budidaya, dari 102 responden terdapat 13 orang atau 12.75% responden telah menerapkan *Good Agricultural Practices* (GAP) sedangkan 89 orang atau 87.25% responden belum menerapkannya. Petani yang telah menerapkan GAP adalah petani pada generasi kedua dan petani pemula dengan pendidikan sarjana dengan umur tanaman antara 5 hingga 8 tahun. Sedangkan responden yang belum menerapkan GAP adalah petani generasi pertama dan kedua, pada petani generasi pertama pada umumnya mendapatkan benih dari hasil cabutan dan sumber tidak resmi kendala saat itu sangat sulit mendapatkan benih berkualitas (Apriyanto et al., 2021). Pada generasi kedua, petani mendapatkan lahan dari warisan orang tua yang telah menjadi tanaman dan membeli dari petani lainya yang masih memiliki nilai ekonomis. Penerapan GAP oleh petani mulai dari pemilihan lahan, pemilihan benih dari penyediaan benih bersertifikat, pemeliharaan tanaman hingga pemanenan. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan produktivitas dan menekan biaya produksi. Pengembangan kelapa sawit pada lahan gambut telah dilakukan oleh pemerintah melalui program K2I maupun program-program kebun kabupaten sebagai upaya mensejahterakan masyarakat (Syahza, Bakce, et al., 2021).

Tabel 1. Komponen Biaya dan Harga Pokok Produksi Berdasarkan Tipologi Lahan

No.	Jenis Biaya	Tipologi Lahan			
		Lahan Kering		Lahan Basah	
		Rp./kg	%	Rp./kg	%
1	Biaya Bahan Baku				
	Pupuk	263.49	17.48	273.68	15.29
	Herbisida	126.98	8.42	136.84	7.65
	Pestisida	39.68	2.63	43.86	2.45
	Fungsida	38.10	2.53	42.11	2.35
	Jumlah BBB	468.25	31.07	496.49	27.74
2	Biaya Tenaga Kerja				
	Panen	125.00	8.29	210.00	11.73
	Angkut	100.00	6.63	150.00	8.38
	Penyemprotan	114.29	7.58	122.81	6.86
	Penebasan	142.86	9.48	140.35	7.84
	Rawat Piringan	23.81	1.58	26.32	1.47
	Pembuangan Pelepah	105.78	7.02	119.30	6.67
	Pemupukan	44.44	2.95	52.63	2.94
	Jaga Kebun	39.68	2.63	43.86	2.45
	Jumlah BTK	695.86	46.17	865.26	48.35
3	Biaya Overhead				
	Biaya Bahan Bakar	39.68	2.63	43.86	2.45
	Pemeliharaan Jalan	31.75	2.11	35.09	1.96
	Pemeliharaan Jembatan	23.81	1.58	29.82	1.67
	Pemeliharaan Parit/kanal	23.81	1.58	47.37	2.65
	Jumlah BO	119.05	7.90	156.14	8.73
4	Biaya Penyusutan				
	Penyusutan Tanaman	192.98	12.80	210.53	11.76
	Penyusutan Peralatan	31.12	2.06	61.12	3.42
	Jumlah Biaya Penyusutan	224.10	14.87	271.65	15.18
	Total Biaya	1,507.26	100.00	1,789.54	100.00

Harga Pokok Produksi

Rerata Harga Pokok Produksi

Harga TBS di pasaran tidak ditentukan oleh harga pokok produksi (HPP) dan sepenuhnya ditentukan oleh pasar merujuk pada Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Riau Nomor 77 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penetapan Harga Pembelian Tandan Buah Segar Kelapa Sawit Produksi Pekebun di Provinsi Riau berdasarkan kriteria umur, rendemen (kualias buah), indeks K dan kemitraan. Akan tetapi harga yang berlaku di pasar tidak mempertimbangkan kriteria umur cenderung mempertimbangkan aspek kemitraan semata. Hal ini seringkali

merugikan petani mandiri atau petani swadaya yang tidak bermintra. Hasil analisis harga pokok produksi usahatani perkebunan kelapa sawit terdiri dari biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, biaya overhead dan biaya penyusutan disajikan pada Tabel 1.

Hasil analisis menunjukkan bahwa rerata harga pokok produksi TBS kelapa sawit swadaya di Kabupaten Indragiri Hilir sebesar Rp.1,648.40/kg yang terdiri dari biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, biaya overhead dan biaya penyusutan masing-masing sebesar Rp.482.37/kg, Rp.780.56/kg, Rp.137.59/kg, dan Rp.247.88/kg. Rerata komponen harga pokok produksi yang terbesar adalah pada biaya tenaga kerja sebesar 47.35% disusul biaya bahan baku 29.26%, biaya penyusutan 15.04% dan biaya overhead 8.35%. Besarnya biaya tenaga kerja yang dikeluarkan berupa biaya variabel untuk pemeliharaan dan pemanenan, salah satu faktor dominan yang mempengaruhi produktivitas perkebunan kelapa sawit adalah pemeliharaan pada tanaman belum menghasilkan (TBM) dan tanaman menghasilkan (TM) (Lubis, 2008). Masyarakat generasi pertama lebih banyak mengandalkan kesuburan yang disediakan oleh alam dalam memproduksi TBS (Agustira et al., 2015).

Selanjutnya rerata produktivitas lahan pada semua tipologi lahan sebanyak 1,005 kg/ha/bln dengan rerata harga TBS selama penelitian sebesar Rp.2,045/kg. Maka hasil penjualan TBS petani sebanyak Rp.2,059,350.00/bln dan petani harus mengeluarkan biaya produksi sebesar Rp.1,648,880.88/ha/bln dengan keuntungan Rp.410,469.12/ha/bln atau setara dengan 24.78% dari HPP. Total produksi TBS dalam setahun sebanyak 12,060 kg/ha/thn, HPP sebesar Rp.19,786,570.52/ha/thn dan keuntungan Rp.4,925,629.48/ha/tahun. Produktivitas lahan ini sangat rendah dibandingkan dengan rerata produktivitas kebun kelapa sawit milik perusahaan rerata sebanyak 24.000 kg/ha/thn dengan HPP yang tidak jauh berbeda dengan perkebunan milik perusahaan. Sehingga keuntungan yang diperoleh petani perkebunan kelapa sawit rakyat swadaya jauh lebih rendah dibandingkan dengan pendapatan petani perkebunan kelapa sawit pola inti plasma (Syahza & Asmit, 2020). Asumsinya jika terjadi kenaikan harga TBS dan HPP tetap maka yang akan menikmati kenaikan pendapatan petani dan pekerja kelapa sawit berdampak pada meningkatkan daya beli masyarakat lokal, yang pada gilirannya dapat menghidupkan perekonomian lokal.

Harga Pokok Produksi pada Lahan Kering

Lahan kering adalah lahan yang dapat didayagunakan secara permanen maupun musiman dengan sumber air berupa hujan atau sumber buatan berada di dataran tinggi > 700 m dpl (Reibelt et al., 2019) dapat digunakan untuk budidaya berbagai jenis tanaman musiman dan tanaman tahunan. Lahan kering yang sesuai untuk tanaman kelapa sawit harus memiliki kontur atau kemiringan dibawah 26 derajat dan dapat penyinaran matahari sepanjang hari (Lubis, 2008). Selama tanaman belum menghasilkan, lahan kering berpotensi dan sesuai untuk integrasi dengan tanaman sela jagung dan kedelai (Agustira et al., 2018) untuk menambah penghasilan petani dan mengurangi biaya produksi selama masih belum menghasilkan.

Hasil analisis HPP pada lahan kering menunjukkan bahwa rerata harga pokok produksi TBS kelapa sawit swadaya pada lahan kering di Kabupaten Indragiri Hilir sebesar Rp.1,507.26 /kg yang terdiri dari biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, biaya overhead dan biaya penyusutan masing-masing sebesar Rp.468.25 /kg, Rp.695.86/kg, Rp.119.05/kg, dan Rp.224.10/kg. Rerata komponen harga pokok produksi yang terbesar adalah pada biaya tenaga kerja sebesar 46.17% disusul biaya bahan baku 31.07%, biaya penyusutan 14.87% dan biaya overhead 7.90%. dari tabel diatas dapat dilihat bahwa HPP TBS kelapa sawit rakyat swadaya pada lahan kering secara biaya lebih murah dibandingkan pada HPP di lahan basah, secara produktivitas dan harga masih lebih tinggi dibandingkan pada lahan basah. Rendahnya biaya disebabkan mudahnya akses dan ketersediaan sarana produksi, sedangkan tingginya biaya produksi karena mulai dari pembukaan lahan, pemeliharaan hingga pemanenan keterbatasan sarana dan prasarana produksi termasuk kondisi jalan usahatani yang jauh kualitasnya dibawah lahan usahatani di lahan kering.

Harga Pokok Produksi pada Lahan Basah

Lahan gambut yang diusahakan oleh masyarakat untuk budidaya kelapa sawit termasuk gambut sedang (100-200 cm) dan pada beberapa lokasi termasuk gambut dalam (> 3 meter). Kejadian kebakaran hutan dan lahan tahun 2015 yang menyebabkan terjadinya kabut asap termasuk kebakaran kebun kelapa sawit yang berada di lahan gambut salah satunya adalah karena kondisi curah hujan yang rendah. peningkatan curah hujan tentunya dapat menjadi salah satu penyebab terjadinya perubahan iklim di Provinsi Riau. Kejadian ini mengakibatkan kerugian secara ekonomi dan ekologis bagi masyarakat luas. Lahan basah sebagai lahan marginal yang masih tersedia sebagai alternatif karena ketersediaan lahan yang semakin sedikit dan harga lahan yang mahal (Bakce & Mustofa, 2021). Lahan basah juga sebagai media subur tumbuhnya keanekaragaman gulma mencapai 1,58 jika jarak tanam kelapa sawit tidak sesuai dengan rekomendasi karena kurang berkompetisi dalam memperebutkan hara, air, cahaya dan ruang tempat tumbuh.

Faktor pembatas lahan lainnya yaitu pengaturan tata air, pencegahan kebakaran, penggunaan amelioran/pupukan, penerapan teknologi spesifik lokasi butuh modal lebih besar, produksi rendah dan input yang lebih banyak (Nasrul et al., 2012). Secara kesesuaian ruang dan peruntukan lahan, lahan gambut juga dibebani fungsi konservasi dan perlindungan sumberdaya air, atas fungsi tersebut dalam proses perizinan dan pengelolaan

akan menambah biaya perolehan atas lahan dan biaya perolehan perizinan berusaha (Hutabarat et al., 2018; Nasrul et al., 2012). Sehingga tidak ada pilihan lain bagi masyarakat yang ingin mengembangkan budidaya perkebunan selain melakukan konversi tanaman dari tanaman perkebunan lainnya menjadi kelapa sawit. Hasil analisis HPP pada lahan basah menunjukkan bahwa rerata harga pokok produksi TBS kelapa sawit swadaya pada lahan basah di Kabupaten Indragiri Hilir sebesar Rp.1,789.54 /kg yang terdiri dari biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, biaya overhead dan biaya penyusutan masing-masing sebesar Rp.496.49 /kg, Rp.865.26 /kg, Rp.156.14 /kg, dan Rp.271.65 /kg. Hal ini menunjukkan bahwa perkebunan kelapa sawit di lahan basah wajib memperhatikan faktor iklim karena memiliki potensi tergenang dan pada lahan gambut gambut perlu dilakukan dengan sangat hati-hati karena lahan sangat mudah mengalami degradasi (kering) dan terbakar.

Harga Pokok Produksi Berdasarkan Pola Budidaya

Tujuan akhir dari kegiatan sebuah usahatani Ketika mencapai produksi dan produktivitas tinggi, produksi dan produktivitas tinggi dapat dicapai dengan penerapan GAP (*Good Agricultural Practices*). Good Agricultural Practices merupakan panduan cara budidaya komoditas pertanian secara tepat, baik, benar, ramah lingkungan dan menghasilkan produk yang aman dikonsumsi. Aktivitas dalam setiap usaha pertanian agar produksi yang dihasilkan memenuhi standar internasional. Komponen biaya dan harga pokok produksi TBS petani swadaya di Kabupaten Indragiri Hilir berdasarkan pola budidaya disajikan pada Tabel 2.

Tabel 2. Komponen Biaya dan Harga Pokok Produksi Berdasarkan Pola Budidaya

No.	Jenis Biaya	GAP		Tidak GAP	
		Rp./kg	%	Rp./kg	%
1	Biaya Bahan Baku				
	Pupuk	331.91	18.12	205.27	14.01
	Herbisida	143.86	7.85	119.96	8.19
	Pestisida	26.78	1.46	56.76	3.87
	Fungsida	50.5	2.76	29.7	2.03
	Jumlah BBB	553.05	30.19	411.69	28.10
2	Biaya Tenaga Kerja				
	Panen	135.62	7.40	199.38	13.61
	Angkut	121.38	6.63	128.62	8.78
	Penyemprotan	147.08	8.03	90.01	6.14
	Penebasan	100	5.46	183.21	12.51
	Rawat Piringan	25	1.36	25.13	1.72
	Pembuangan Pelepah	126.71	6.92	98.37	6.72
	Pemupukan	55	3.00	42.08	2.87
	Jaga Kebun	74	4.04	9.54	0.65
	Jumlah BTK	784.79	42.84	776.34	53.00
3	Biaya Overhead				
	Biaya Bahan Bakar	52.08	2.84	31.46	2.15
	Pemeliharaan Jalan	44.06	2.41	22.77	1.55
	Pemeliharaan Jembatan	34.55	1.89	19.08	1.30
	Pemeliharaan Parit/kanal	44.71	2.44	26.47	1.81
	Jumlah BO	175.4	9.57	99.78	6.81
4	Biaya Penyusutan				
	Penyusutan Tanaman	257.66	14.07	145.85	9.96
	Penyusutan Peralatan	61.01	3.33	31.23	2.13
	Jumlah Biaya Penyusutan	318.67	17.40	177.08	12.09
	Total Biaya	1,831.91	100.00	1,464.89	100.00

Hasil analisis HPP berdasarkan pola pengelolaan petani yang telah menerapkan GAP, HPP TBS sebesar Rp.1,831.91/kg dan yang belum menerapkan GAP sebesar Rp.1,464.89/kg. Selisih biaya tersebut pada seluruh komponen biaya dan yang terbesar pada biaya tenaga kerja. Hal ini menunjukkan bahwa penerapan GAP butuh biaya untuk meningkatkan produktivitas dicapai dengan Teknik budidaya yang tepat, mulai dari pembukaan lahan, pembibitan, penanaman, pemeliharaan, pemanenan dan penanganan pasca panen. Produktivitas lahan petani yang telah menerapkan GAP sebanyak 1,250 kg/TBS/ha/bln, sedangkan petani yang belum menerapkan GAP sebanyak 760 kg/TBS/ha/bln. Harga jual TBS petani yang telah menerapkan GAP melalui pola kemitran rerata sebesar Rp. 2,315/kg sedangkan harga TBS petani yang belum menerapkan GAP rerata sebesar Rp.1775/kg. Pendapatan dan keuntungan petani yang telah menerapkan GAP masing-masing sebesar Rp.2,893,750/ha/bln dan Rp. 603,863/ha/bln. Sedangkan pendapatan dan keuntungan petani yang telah menerapkan GAP masing-masing sebesar Rp.1,349,000 /ha/bln dan Rp.235,684 /ha/bln.

PENUTUP

Kesimpulan dari penelitian ini adalah: (1) Berdasarkan tipologi lahan, rerata harga pokok produksi (HPP) tandan buah segar (TBS) kelapa sawit rakyat pola swadaya di Kabupaten Indragiri Hilir sebesar Rp.1,648.40/kg, HPP pada lahan kering sebesar Rp.1,507.26/kg dan HPP pada lahan basah sebesar Rp.1,789.54/kg. (2) Berdasarkan pola budidaya, petani yang telah menerapkan GAP rerata HPP sebesar Rp.1,831.91/kg TBS dan petani yang belum menerapkan GAP rerata HPP sebesar Rp. 1,464.89/kg.

Saran dari penelitian ini adalah: (1) Setiap kegiatan usaha khususnya usahatani berbasis lahan untuk melakukan pencatatan setiap biaya produksi, setiap tipologi lahan memiliki karakteristik dan biaya yang berbeda. (2) Pemerintah telah mewajibkan setiap petani kelapa sawit untuk menerapkan GAP untuk meningkatkan produktivitas dan pendapatan.

DAFTAR RUJUKAN

- Agustira, M. A., Amalia, R., & Nurkhoiry, R. (2015). Program Sawit Untuk Rakyat (Prowitra) Sebagai Upaya Peningkatan Produktivitas, Pemberdayaan, Keberlanjutan, Dan Kesejahteraan Pekebun Kelapa Sawit Rakyat. *Jurnal Penelitian Kelapa Sawit*, 25(1), 315–324.
- Agustira, M. A., Lubis, I., Listia, E., Akoeb, E. N., Harahap, I. Y., & Lubis, M. E. S. (2018). Analisis Finansial Dan Ekonomi Tanaman Sela (Jagung Dan Sawit Financial and Economic Analysis of Intercropping Maize and Soybean on Immature Oil Palm. *J. Pen. Kelapa Sawit*, 26(3), 141–152.
- Amalia, R., Nurkhoiry, R., Nasution, Z. P. S., & Kurniawan, A. (2017). Case Study of Farmers in Ophir, West Pasaman Regency, West Sumatra Province). *Jurnal Penelitian Kelapa Sawit*, 25(3), 171–182. <https://doi.org/10.22302/iopri.jur.jpks.v25i3.34>
- Apriyanto, M., Partini, Mardesci, H., Syahrantau, G., & Yulianti. (2021). The Role of Farmers Readiness in the Sustainable Palm Oil Industry The Role of Farmers Readiness in the Sustainable Palm Oil Industry. *Journal of Physics: Conference Serie*, 1764(1), 1–7. <https://doi.org/10.1088/1742-6596/1764/1/012211>
- Asmarantaka, R. W. (2014). *Ruang Lingkup Manajemen Agribisnis*. <https://pustaka.ut.ac.id/lib/wp-content/uploads/pdfmk/LUHT423502-M1.pdf>
- Atikah, N., & Sutopo, W. (2014). Simulasi Model Dinamik Pengangkutan Crude Palm Oil (Cpo) Di Pt. Xyz Untuk Meminimalkan Biaya Transportasi Pengadaan Bahan. *J@Ti Undip : Jurnal Teknik Industri*, 9(2), 125–134. <https://doi.org/10.12777/jati.9.2.125-134>
- Bakce, R., & Mustofa, R. (2021). Kesempatan Kerja Dan Kelayakan Ekonomi Usaha Perkebunan Kelapa Sawit Rakyat Di Kabupaten Indragiri Hulu. *Jurnal Inovasi Penelitian*, 2(7), 2213–2220.
- Bareille, F., Boussard, H., & Thenail, C. (2020). Productive ecosystem services and collective management: Lessons from a realistic landscape model. *Ecological Economics*, 169(August 2019), 106482. <https://doi.org/10.1016/j.ecolecon.2019.106482>
- Dirjenbun. (2022). *Buku Statistik Perkebunan 2020-2022*.
- Evizal, R. (2014). Dasar-dasar Produksi Perkebunan. In H. M. Akin (Ed.), *Dasar-dasar Produksi Perkebunan* (Ke-1, pp. 1–27). Graha Ilmu.
- Faizal, M., Wardah, Y., H., Husna, M. A., Amirah, A., & Tan, Y. H. (2018). Energy, Economic And Environmental Impact Of Palm Oil Biodiesel In. *Journal of Mechanical Engineering Research and Developments (JMERE)*, 41(3), 93–95.
- Fauziyyah, N., Irwansyah, R., Ersyafdi, I. R., Manurung, S., Sholihat, W., Corrina, F., Suharmiyati, S., Nainggolan, C. D., Listya, K., Ahmadi, L. P., Bairizki, A., Hidayadi, T., Prabowo, M. A., Pattiaapon, M. L., & Utami, F. (2021). Akuntansi Biaya. In *CV WIDINA MEDIA UTAMA*. CV WIDINA MEDIA UTAMA.
- Hafif, B., Ernawati, R., & Pujiarti, Y. (2020). Peluang Peningkatan Produktivitas Kelapa Sawit Rakyat Di Provinsi Lampung. *Jurnal Penelitian Tanaman Industri*, 20(2), 101. <https://doi.org/10.21082/jlitri.v20n2.2014.101-109>
- Haque, M. I., & Basak, R. (2017). Land cover change detection using GIS and remote sensing techniques: A spatio-temporal study on Tanguar Haor, Sunamganj, Bangladesh. *Egyptian Journal of Remote Sensing and Space Science*, 20(2), 251–263. <https://doi.org/10.1016/j.ejrs.2016.12.003>
- Harefa RA, Zebua P, S., & Bawamenewi, A. (2022). Analisis Biaya Produksi Dengan Menggunakan Metode Full Costing Dalam Perhitungan Harga Pokok Produksi. 1(2), 218–223. <https://doi.org/10.56248/jamane.v1i2.36>
- Hutabarat, S. (2017). Tantangan Keberlanjutan Pekebun Kelapa Sawit Rakyat Di Kabupaten Pelalawan, Riau Dalam Perubahan Perdagangan Global*. *Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial Indonesia*, 43(1), 47–64. <https://jmi.ipisk.lipi.go.id/index.php/jmiipisk/article/view/713>
- Hutabarat, S., Slingerland, M., Rietberg, P., & Dries, L. (2018). Costs and benefits of certification of independent oil palm smallholders in Indonesia. *International Food and Agribusiness Management Review*, 21(6), 681–700. <https://doi.org/10.22434/IFAMR2016.0162>

- Kariyasa, I. K. (2015). Financial Feasibility Analysis of Oil Palm Certified Seed Adoption in West Kalimantan Province. *Jurnal Agro Ekonomi*, 33(2), 141–159.
- Kristiadi Harun, M., & Dwiprabowo, H. (2014). Model Resolusi Konflik Lahan Di Kesatuan Pemangkuan Hutan Produksi Model Banjar. *Jurnal Penelitian Sosial Dan Ekonomi Kehutanan*, 11(4), 265–280. <https://doi.org/10.20886/jpsek.2014.11.4.265-280>
- Lubis, A. U. (2008). Kelapa sawit (*elaeis guineensis jacq.*) di Indonesia. *Pusat Penelitian Kelapa Sawit*, 1–382.
- Maleong, L. J. (2013). *Metodologi Penelitian Kuantitatif* (C. R. Semiawan, Ed.; Revisi). PT. Remaja Rosdakarya Bandung.
- Maulida, E. (2021). *Pengantar Manajemen*. <https://www.researchgate.net/publication/376954799>
- Mulyadi, M., Lestari, T. R. P., Alawiyah, F., Wahyuni, D., Astri, H., Martiany, D., Rivani, E., & Qodriyatun, S. N. (2015). *Pembangunan Berkelanjutan: Dimensi Sosial, Ekonomi, dan Lingkungan* (Sali Susiana, Ed.; 1st ed.). P3DI Setjen DPR RI dan Azza Grafika.
- Mustofa, R. (2017). Analisis Usahatani Kelapa Sawit Pola Swadaya Pada Lahan Basah di Kabupaten Indragiri Hilir. *Jurnal Penelitian Dan Kajian Ilmiah*, XI(74), 20–25.
- Mustofa, R. (2021). Komparasi Usahatani Perkebunan Kelapa Sawit Rakyat Di Kabupaten Rokan Hilir. *MEDIA BINA ILMIAH*, 15(11), 5667–5674. <https://doi.org/https://doi.org/10.33758/mbi.v15i11.1172>
- Mustofa, R., & Bakce, R. (2019). Potensi Konflik Lahan Perkebunan Kelapa Sawit. *Unri Conference Series: Agriculture and Food Security*, 1, 58–66. <https://doi.org/10.31258/unricsagr.1a8>
- Muta' Ali, L., Kinasih, S. S., & Sumini, K. (2012). *Daya dukung lingkungan untuk perencanaan pengembangan wilayah*.
- Nasrul, B., Hamzah, A., Nedi, S., Pengajar Jurusan Ilmu Tanah, S., Pertanian, F., Riau, U., Pengajar Jurusan Biologi, S., Mipa, F., Pengajar Jurusan Agroteknologi, S., Pengajar Jurusan Kimia Lingkungan, S., Bidang Ekonomi Pembangunan, S., & Provinsi Riau, B. (2012). Model Pengelolaan Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Pada Lahan Gambut di Provinsi Riau Model of Sustainability of Palm Oil Management in Peatlands, Riau. In *J. Agrotek. Trop* (Vol. 1, Issue 1).
- Nurkholis, A., & Sitanggang, I. S. (2019). A spatial analysis of soybean land suitability using spatial decision tree algorithm. *Proc.SPIE*, 11372. <https://doi.org/10.1117/12.2541555>
- P3ES, P. P. P. E. S. (2021). Daya Dukung Daya Tampung Lingkungan hidup Jasa Ekosistem Perkebunan Kelapa Sawit di Provinsi Riau. In *Paper Knowledge . Toward a Media History of Documents*.
- Pahan, I. (2008). *Panduan Lengkap Kelapa Sawit* (R. A. Surip Prayuga, Ed.; 5th ed.). Penebar Swadaya.
- Pahan, I. (2012). *Panduan Lengkap Kelapa Sawit Manajemen Agribisnis dari Hulu Hingga Hilir* (R. Armando, Ed.). Penebar Swadaya.
- Pahan, I. (2015). *Panduan Teknis Budidaya Kelapa Sawit*. (L. H. Apriyanti, Ed.; 1st ed.). Penebar Swadaya.
- Peraturan Menteri Pertanian. (2016). *Pedoman Peremajaan Perkebunan Kelapa Sawit*.
- Purwanto, E., & Watini, S. S. (2020). Analisis Harga Pokok Produksi Menggunakan Metode Full Costing Dalam Penetapan Harga Jual (Studi Kasus Unit Usaha Regar Fruit). In *Journal Of Applied Managerial Accounting* (Vol. 4, Issue 2).
- Ratmini, N. S. (2012). Karakteristik dan Pengelolaan Lahan Gambut untuk Pengembangan Pertanian. *Jurnal Lahan Suboptimal*, 1(2), 197–206.
- Reibelt, L. M., Moser, G., Dray, A., Randriamalala, I. H., Chamagne, J., Ramamonjisoa, B., Barrios, L. G., Garcia, C., & Waeber, P. O. (2019). Tool development to understand rural resource users' land use and impacts on land type changes in Madagascar. *Madagascar Conservation & Development*, 0(0), 1–10. <https://doi.org/10.4314/mcd.wetlands.3>
- Ritohardoyo, S., & Sadali, M. I. (2017). Kesesuaian Keberadaan Rumah Tidak Layak Huni (Rtlh) Terhadap Tata Ruang Wilayah Di Kota Yogyakarta. *Tataloka*, 19(4), 291. <https://doi.org/10.14710/tataloka.19.4.291-305>
- Rosnita, R. (2012). Tingkat Keberdayaan Lembaga Keuangan Mikro Dalam Peningkatan Produksi Kelapa Sawit Di Provinsi Riau Kasus Lembaga Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (Ued-Sp) Di Kabupaten Rokan Hulu. *Seminar Dan Rapat Tahunan Bidang Ilmu Pertanian BKS-PTN Wilayah Barat Tahun 2012*, 480.
- Saeri, Moh. (2018). *Usahatani Dan Analisisnya* (H. Subagyo, Ed.; 1st–136th ed.). Uninda Press.
- Sparta & Handini. (2015). Pengaruh Manajemen Laba. ... *Opini Audit Going Concern, Skripsi Fakultas Ekonomi* ..., 12(1), 52–71.
- Suwondo, Syahza, A., Wulandari, S., Darmadi, Gupta, P., Sharma, A. M., Behl, A., Singh, M., Devi, C. U., Bedarkar, M., Pandita, D., Janvale, G., Kendre, S., Mehrotra, S., Hh, R. P., F, D. D. E. D. O. L. D., Hanaysha, J., Ahmad, N., Decramer, A., ... Nasrul, B. (2021). Development of Superior Plantation Commodities Based on Sustainable Development. *Nternational Journal of Sustainable Development and Planning*, 15(1), 51–59. <https://doi.org/https://doi.org/10.18280/ijstdp.160408>
- Syahza, A. (2021). Metodologi Penelitian. In *Edisi Revisi* (p. 223).

- Syahza, A., & Asmit, B. (2019). Regional economic empowerment through oil palm economic institutional development. *Management of Environmental Quality: An International Journal*, 30(6), 1256–1278. <https://doi.org/10.1108/MEQ-02-2018-0036>
- Syahza, A., & Asmit, B. (2020). Development of palm oil sector and future challenge in Riau Province, Indonesia. *Journal of Science and Technology Policy Management*, 11(2), 149–170. <https://doi.org/10.1108/JSTPM-07-2018-0073>
- Syahza, A., Bakce, D., Irianti, M., Asmit, B., & Nasrul, B. (2021). Development of Superior Plantation Commodities Based on Sustainable Development. *International Journal of Sustainable Development and Planning*, 15(August), 1267–1275. <https://doi.org/https://doi.org/10.18280/ijstdp.160408>
- Syahza, A., Robin, Suwondo, & Hosobuchi, M. (2021). Innovation for the development of environmentally friendly oil palm plantation in Indonesia. *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, 716(1). <https://doi.org/10.1088/1755-1315/716/1/012014>
- Turang M, T., Pangemanan, S. S., Pinatik, S., Akuntansi, J., & Ekonomi dan Bisnis, F. (2022). *Penerapan Metode Full Costing Dalam Perhitungan Harga Pokok Produksi Pada Kedai Kopi Pulang Manado Application Of The Cost Of Goods Manufactured By Using The Full Costing Method At Kopi Pulang Manado* (Vol. 5, Issue 2).
- Wahyuni, D. (2017). Penguatan kelembagaan petani menuju kesejahteraan petani. *Singkat*, 9(17), 9–12.
- Wicaksono, D. A., Rifin, A., & Pahan, I. (2018). The Sustainability of Three Indonesian Palm Oil Business Entities. *Jurnal Manajemen Dan Agribisnis*, 15(3), 249–257. <https://doi.org/10.17358/jma.15.3.249>